



BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN

NOMOR 06 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR 31
TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatra Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1968, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia 2016 Nomor 478);
6. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015 Nomor 32), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 12),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015 Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 12), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Alokasi Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa.
 - (2) Alokasi Dana Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) disalurkan oleh kabupaten kepada Desa.
 - (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan Tahap I sebesar 40%, Tahap II sebesar 40%, dan Tahap III sebesar 20%.
2. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

Pengajuan pencairan Bagi Hasil Pajak dan Restribusi, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk Tahap Pertama dengan prosedur dan persyaratan sebagai berikut :

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati melalui BPKAD.
- (2) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri dengan :
 - a. Verifikasi dan Rekomendasi Camat;
 - b. Verifikasi dan Rekomendasi DPMD;
 - c. Dokumen Peraturan Desa tentang APBDes yang telah dievaluasi oleh Camat;
 - d. Dokumen Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi APBDes tahun sebelumnya;
 - e. Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa (DD) tahun sebelumnya;
 - f. Laporan Realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun sebelumnya;
 - g. Photo Copy Rekening Desa; dan
 - h. Masing-masing dibuat dalam 4 (empat) rangkap diperuntukan arsip desa, kecamatan, Dinas PMD dan BPKAD.
- (3) Format Laporan Realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan f sebagaimana tercantum Lampiran XIII dan Lampiran XIV Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Pengajuan pencairan Dana Desa tahap kedua dan Alokasi Dana

Desa untuk Tahap kedua dan tahap Ketiga dengan prosedur dan persyaratan sebagai berikut :

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati melalui BPKAD.
- (2) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri:
 - a. Verifikasi dan Rekomendasi Camat;
 - b. Verifikasi dan Rekomendasi DPMD;
 - c. Laporan realisasi penggunaan dana tahap sebelumnya;
 - d. Realisasi penggunaan dana tahap sebelumnya sebagai mana dimaksud pada huruf c menunjukkan Dana Desa tahap sebelumnya telah digunakan minimal sebesar 80% (Delapan Puluh Persen);
 - e. Photo copy Rekening Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 17 Maret 2017

BUPATI BENGKULU SELATAN,

ttd

H. DIRWAN MAHMUD

Diundangkan di Manna
pada tanggal 17 Maret 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

ttd

DARMIN, SE
NIP. 19581206.198102.1.004

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 06

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM



HENDRI DONAN
NIP 19750825 200502 1 005

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
 NOMOR 06 TAHUN 2017
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
 NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN
 PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

KODE REKENING					PENDAPATAN	ANGGARAN	KET
1					PENDAPATAN		
1	1				Pendapatan Asli Desa		
1	1	1			Hasil Usaha Desa		
1	1	1	01		Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa		
1	1	1	02		Hasil Pengelolaan Pasar Desa		
1	1	1	03		Hasil Pengelolaan Pasar Hewan		
1	1	1	04		Hasil Pelelangan Ikan yang Dikelola Desa		
1	1	1	05		Hasil Usaha Desa Lainnya		
1	1	2			Hasil Aset Desa		
1	1	2	01		Pendapatan Sewa Tanah Kas Desa		
1	1	2	02		Pendapatan Sewa Gedung Milik Desa		
1	1	3			Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1	1	3	01		Hasil Swadaya		
1	1	3	02		Hasil Gotong Royong		
1	1	3	03		Hasil Partisipasi Lainnya		
1	1	4			Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah		
1	1	4	01		Pungutan Desa		
1	1	4	02		Hasil Penjualan Aset Desa selain tanah yang tidak dipisahkan		
1	1	4	03		Hasil Pelepasan Tanah Desa Tahun Berjalan		
1	1	4	04		Bunga Simpanan Uang Di Bank		
1	1	4	05		Tuntutan Ganti Kerugian (TGR)		
1	1	4	06		Pendapatan Dari Angsuran/Cicilan Penjualan		
1	1	4	07		Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan		

					Belanja		
1	1	4	08		Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan		
1	1	4	09		Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah		
1	2				Pendapatan Transfer		
1	2	1			Dana Desa		
1	2	1	01		Dana Desa		
1	2	2			Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi		
1	2	2	01		Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah		
1	2	3			Alokasi Dana Desa		
1	2	3	01		Alokasi Dana Desa		
1	2	4			Bantuan Keuangan Provinsi		
1	2	4	01		Bantuan Keuangan Dari APBD Provinsi		
1	2	5			Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		
1	2	5	01		Bantuan Keuangan Dari APBD Kabupaten		
1	3				Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah		
1	3	1			Pendapatan Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga		
1	3	1	01		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat		
1	3	1	02		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Kabupaten/Kota		
1	3	1	03		Pendapatan Hibah dari Organisasi/Lembaga Swasta		
1	3	1	04		Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan		
1	3	1	05		Pendapatan Hibah dari Perusahaan di Desa		
1	3	1	06		Pendapatan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Lainnya		
1	3	2			Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah		

1	3	2	01		Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah		
---	---	---	----	--	------------------------------------	--	--

KODE REKENING					BIDANG DAN KEGIATAN	ANGGARAN	KET
2					BELANJA		
2	1				Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		
2	1	1			Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
2	1	1	1		Belanja Pegawai		
2	1	1	1	X		
2	1	2			Kegiatan Operasional Kantor Desa		
2	1	2	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	1	2	2	X		
2	1	2	3		Belanja Modal		
2	1	2	3	X		
2	1	3			Kegiatan Operasional BPD		
2	1	3	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	1	3	2	X		
2	1	3	3		Belanja Modal		
2	1	3	3	X		
2	1	4			Kegiatan Operasional RT/RW		
2	1	4	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	1	4	2	X		
2	1	4	3		Belanja Modal		
2	1	4	3	X		
2	1	5			Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Desa		
2	1	5	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	1	5	2	X		
2	1	5	3		Belanja Modal		
2	1	5	3	X		

2	1	6			Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa		
2	1	6	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	1	6	2	X		
2	1	6	3		Belanja Modal		
2	1	6	3	X		
2	1	7			Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa		
2	1	7	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	1	7	2	X		
2	1	7	3		Belanja Modal		
2	1	7	3	X		
2	1	8			Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa		
2	1	8	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	1	8	2	X		
2	1	8	3		Belanja Modal		
2	1	8	3	X		
2	1	9			dst		
2	2				Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2	2	1			Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi		
2	2	1	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	2	1	2	X		
2	2	1	3		Belanja Modal		
2	2	1	3	X		
2	2	2			Kegiatan Pembangunan Jalan Desa		
2	2	2	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	2	2	2	X		
2	2	2	3		Belanja Modal		
2	2	2	3	X		
2	2	3			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Kantor		

2	2	3	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	2	3	2	X		
2	2	3	3		Belanja Modal		
2	2	3	3	X		
2	2	4			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial		
2	2	4	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	2	4	2	X		
2	2	4	3		Belanja Modal		
2	2	4	3	X		
2	2	5			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan		
2	2	5	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	2	5	2	X		
2	2	5	3		Belanja Modal		
2	2	5	3	X		
2	2	6			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan		
2	2	6	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	2	6	2	X		
2	2	6	3		Belanja Modal		
2	2	6	3	X		
2	2	7			Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan		
2	2	7	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	2	7	2	X		
2	2	7	3		Belanja Modal		
2	2	7	3	X		
2	2	8			Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Masyarakat		

2	2	8	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	2	8	2	X		
2	2	8	3		Belanja Modal		
2	2	8	3	X		
2	2	9			Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup		
2	2	9	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	2	9	2	X		
2	2	9	3		Belanja Modal		
2	2	9	3	X		

2	2	10			Kegiatan Pemeliharaan Sarana Prasarana Aparatur Desa		
2	2	10	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	2	10	2	X		
2	2	10	3		Belanja Modal		
2	2	10	3	X		
2	2	11			Kegiatan Pemeliharaan Sarana Prasarana Masyarakat		
2	2	11	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	2	11	2	X		
2	2	11	3		Belanja Modal		
2	2	11	3	X		
2	2	12			Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih		
2	2	12	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	2	12	2	X		
2	2	12	3		Belanja Modal		
2	2	12	3	X		

	2	13			Kegiatan Pembangunan Sarana Listrik Mikro Hidro		
2	2	13	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	2	13	2	X		
2	2	13	3		Belanja Modal		
2	2	13	3	X		
2	2	14			Kegiatan Pembangunan Gapura dan Tanda Batas Desa		
2	2	14	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	2	14	2	X		
2	2	14	3		Belanja Modal		
2	2	14	3	X		
2	2	15			Kegiatan Pembangunan Tambatan Perahu		
2	2	15	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	2	15	2	X		
2	2	15	3		Belanja Modal		
2	2	15	3	X		
2	2	16			Kegiatan Pembangunan/Pembaikan Rumah Sehat Fakir Miskin		
2	2	16	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	2	16	2	X		
2	2	16	3		Belanja Modal		
2	2	16	3	X		
2	2	17			Kegiatan Pembanguna/Pembuatan Selokan		
2	2	17	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	2	17	2	X		
2	2	17	3		Belanja Modal		
2	2	17	3	X		
2	2	18			Kegiatan Pembangunan/Pembuatan Tempat Pembuangan Sampah		

2	2	18	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	2	18	2	X		
2	2	18	3		Belanja Modal		
2	2	18	3	X		
2	2	19			Kegiatan Pembuatan Gerobak Sampah		
2	2	19	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	2	19	2	X		
2	2	19	3		Belanja Modal		
2	2	19	3	X		
2	2	20			Kegiatan Pengadaan Kendaraan Pengangkut Sampah		
2	2	20	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	2	20	2	X		
2	2	20	3		Belanja Modal		
2	2	20	3	X		
2	2	21			Kegiatan Pengadaan Mesin Pengolah Sampah		
2	2	21	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	2	21	2	X		
2	2	21	3		Belanja Modal		
2	2	21	3	X		
2	2	22			Kegiatan Pembangunan Jembatan Desa		
2	2	22	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	2	22	2	X		
2	2	22	3		Belanja Modal		
2	2	22	3	X		
2	2	23			Kegiatan Pengadaan Jaringan Internet Desa		
2	2	23	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	2	23	2	X		

2	2	23	3		Belanja Modal		
2	2	23	3	X		
2	2	24			Kegiatan Pembuatan Website Desa		
2	2	24	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	2	24	2	X		
2	2	24	3		Belanja Modal		
2	2	24	3	X		
2	2	25			Kegiatan Pengadaan Peralatan Pengeras Suara		
2	2	25	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	2	25	2	X		
2	2	25	3		Belanja Modal		
2	2	25	3	X		
2	2	26			Kegiatan Pembangunan/Pembuatan Taman Bacaan Masyarakat		
2	2	26	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	2	26	2	X		
2	2	26	3		Belanja Modal		
2	2	26	3	X		
2	2	27			Kegiatan Pembangunan Bangunan PAUD		
2	2	27	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	2	27	2	X		
2	2	27	3		Belanja Modal		
2	2	27	3	X		
2	2	28			Kegiatan Pengadaan Buku dan Peralatan Belajar PAUD		
2	2	28	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	2	28	2	X		
2	2	28	3		Belanja Modal		
2	2	28	3	X		

2	2	29			Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Desa		
2	2	29	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	2	29	2	X		
2	2	29	3		Belanja Modal		
2	2	29	3	X		
2	2	30			Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Industri Kecil		
2	2	30	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	2	30	2	X		
2	2	30	3		Belanja Modal		
2	2	30	3	X		
2	2	31			Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana TTG		
2	2	31	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	2	31	2	X		
2	2	31	3		Belanja Modal		
2	2	31	3	X		
2	2	32			Dst		
2	3				Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
2	3	1			Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban		
2	3	1	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	3	1	2	X		
2	3	1	3		Belanja Modal		
2	3	1	3	X		
2	3	2			Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga		
2	3	2	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	3	2	2	X		
2	3	2	3		Belanja Modal		
2	3	2	3	X		

2	3	3				Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK		
2	3	3	2			Belanja Barang dan Jasa		
2	3	3	2	X			
2	3	3	3			Belanja Modal		
2	3	3	3	X			
2	3	4				Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya		
2	3	4	2			Belanja Barang dan Jasa		
2	3	4	2	X			
2	3	4	3			Belanja Modal		
2	3	4	3	X			
2	3	5				Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama		
2	3	5	2			Belanja Barang dan Jasa		
2	3	5	2	X			
2	3	5	3			Belanja Modal		
2	3	5	3	X			
2	3	6				Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat		
2	3	6	2			Belanja Barang dan Jasa		
2	3	6	2	X			
2	3	6	3			Belanja Modal		
2	3	6	3	X			
2	3	7				Kegiatan Pembinaan Anak Usia Dini		
2	3	7	2			Belanja Barang dan Jasa		
2	3	7	2	X			
2	3	7	3			Belanja Modal		
2	3	7	3	X			
2	3	8				Dst		
2	4					Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
2	4	1				Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat		

2	4	1	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	4	1	2	X		
2	4	1	3		Belanja Modal		
2	4	1	3	X		
2	4	2			Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat		
2	4	2	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	4	2	2	X		
2	4	2	3		Belanja Modal		
2	4	2	3	X		
2	4	3			Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB		
2	4	3	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	4	3	2	X		
2	4	3	3		Belanja Modal		
2	4	3	3	X		
2	4	4			Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat		
2	4	4	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	4	4	2	X		
2	4	4	3		Belanja Modal		
2	4	4	3	X		
2	4	5			Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan		
2	4	5	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	4	5	2	X		
2	4	5	3		Belanja Modal		
2	4	5	3	X		
2	4	6			Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna		
2	4	6	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	4	6	2	X		
2	4	6	3		Belanja Modal		

2	4	6	3	X		
2	4	7			Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga		
2	4	7	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	4	7	2	X		
2	4	7	3		Belanja Modal		
2	4	7	3	X		
2	4	8			Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan		
2	4	8	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	4	8	2	X		
2	4	8	3		Belanja Modal		
2	4	8	3	X		
2	4	9			Kegiatan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		
2	4	9	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	4	9	2	X		
2	4	9	3		Belanja Modal		
2	4	9	3	X		
2	4	10			Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		
2	4	10	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	4	10	2	X		
2	4	10	3		Belanja Modal		
2	4	10	3	X		
2	4	11			Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kerja		
2	4	11	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	4	11	2	X		
2	4	11	3		Belanja Modal		
2	4	11	3	X		
2	4	12			Kegiatan Penyusunan Profil Desa		

2	4	12	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	4	12	2	X		
2	4	12	3		Belanja Modal		
2	4	12	3	X		
2	4	13			Kegiatan Penyusunan Peta Aset Desa		
2	4	13	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	4	13	2	X		
2	4	13	3		Belanja Modal		
2	4	13	3	X		
2	4	14			Kegiatan Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat		
2	4	14	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	4	14	2	X		
2	4	14	3		Belanja Modal		
2	4	14	3	X		
2	4	15			Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa		
2	4	15	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	4	15	2	X		
2	4	15	3		Belanja Modal		
2	4	15	3	X		
2	4	16			Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa		
2	4	16	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	4	16	2	X		
2	4	16	3		Belanja Modal		
2	4	16	3	X		
2	4	17			Kegiatan Lomba Desa		
2	4	17	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	4	17	2	X		

2	4	17	3		Belanja Modal		
2	4	17	3	X		
2	4	18			Kegiatan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi		
2	4	18	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	4	18	2	X		
2	4	18	3		Belanja Modal		
2	4	18	3	X		
2	4	19			Dst		
2	5				Bidang Tidak Terduga		
2	5	1			Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam		
2	5	1	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	5	1	2	X		
2	5	1	3		Belanja Modal		
2	5	1	3	X		
2	5	2			Kegiatan Penanggulangan Bencana Lain		
2	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	5	2	2	X		
2	5	2	3		Belanja Modal		
2	5	2	3	X		

KODE REKENING					BELANJA	ANGGARAN	KET
2	1	1	1		Belanja Pegawai		
2	1	1	1	01	Penghasilan Tetap kepala Desa dan Perangkat		
2	1	1	1	02	Penghasilan Tetap Staf Pemerintahan Desa		
2	1	1	1	03	Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa		
2	1	1	1	04	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat		
2	1	1	1	05	Tunjangan Akhir Masa Jabatan Kades dan Perangkat		

2	1	1	1	06	Tunjangan BPD dan Anggotanya		
2	1	1	1	07	Uang Sidang BPD dan Anggotanya		
2	1	1	1	08	Insentif RT/RW		
2	1	1	1	09	Operasional Kepala Desa dan Perangkat		
2	1	1	1	10	Tunjangan Pengelola Aset dan Keuangan Desa		
2	1	1	1	11	Uang Lembur		
2	1	1	1	12	Tunjangan Hari Raya		
2	1	1	1	13	Insentif Kepala Dusun		
2	X	X	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	X	X	X	01	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet		
2	X	X	X	02	Belanja Alat Tulis Kantor		
2	X	X	X	03	Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih		
2	X	X	X	04	Belanja Benda Pos dan Materai		
2	X	X	X	05	Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu		
2	X	X	X	06	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan		
2	X	X	X	07	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		
2	X	X	X	08	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya		
2	X	X	X	09	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan		
2	X	X	X	10	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja		
2	X	X	X	11	Belanja Sewa Peralatan		
2	X	X	X	12	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor		
2	X	X	X	13	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas		
2	X	X	X	14	Belanja Honorarium Tim Panitia		
2	X	X	X	15	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber		
2	X	X	X	16	Belanja Perjalanan Dinas		
2	X	X	X	17	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi		
2	X	X	X	18	Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Prasarana		
2	X	X	X	19	Belanja Barang untuk Diberikan kepada Masyarakat		

2	X	X	X	20	Belanja Sewa Ruang atau Gedung		
2	X	X	X	21	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll)		
2	X	X	X	22	Belanja Surat Kabar/Majalah		
2	X	X	X	23	Belanja Pemasangan Iklan/Surat Kabar/Majalah		
2	X	X	X	24	Belanja Premi Asuransi		
2	X	X	X	25	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan		
2	X	X	X	26	Belanja Insentif		
2	X	X	X	27	Belanja Transportasi		
2	X	X	X	28	Belanja Akomodasi		
2	X	X	X	29	Belanja Setoran		
2	X	X	X	30	Belanja Makanan Tambahan		
2	X	X	X	31	Belanja Peralatan Olahraga		
2	X	X	3		Belanja Modal		
2	X	X	X	01	Belanja Modal Tanah Bangunan Kantor		
2	X	X	X	02	Belanja Modal Tanah Rumah Dinas		
2	X	X	X	03	Belanja Modal Tanah Pertanian dan Perkebunan		
2	X	X	X	04	Belanja Modal Tanah Sarana Kesehatan		
2	X	X	X	05	Belanja Modal Tanah Sarana Pendidikan		
2	X	X	X	06	Belanja Modal Tanah Sarana Umum		
2	X	X	X	07	Belanja Modal Tanah Sarana Jalan		
2	X	X	X	08	Belanja Modal Tanah Lainnya		
2	X	X	X	09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan		
2	X	X	X	10	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel		
2	X	X	X	11	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur		
2	X	X	X	12	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolah Pertanian dan Peternakan		
2	X	X	X	13	Belanja Modal Pengadaan Peralatan kantor		
2	X	X	X	14	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga		
2	X	X	X	15	Belanja Modal Pengadaan Komputer		
2	X	X	X	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat		

					Studio/Audio		
2	X	X	X	17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi		
2	X	X	X	18	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
2	X	X	X	19	Belanja Modal Pengadaan Gedung Kantor/Tempat Kerja		
2	X	X	X	20	Belanja Modal Pengadaan Gedung Rumah Dinas/Jabatan		
2	X	X	X	21	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gudang		
2	X	X	X	22	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Bersejarah		
2	X	X	X	23	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Monumen		
2	X	X	X	24	Belanja Modal Pengadaan Tugu Peringatan		
2	X	X	X	25	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya		
2	X	X	X	26	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa		
2	X	X	X	27	Belanja Modal Pengadaan Jembatan Desa		
2	X	X	X	28	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air		
2	X	X	X	29	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Lingkungan		
2	X	X	X	30	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon		
2	X	X	X	31	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolah Sampah		
2	X	X	X	32	Belanja Modal Pengadaan Buku dan Kepustakaan		
2	X	X	X	33	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan		
2	X	X	X	34	Belanja Modal Pengadaan Hewan dan Ternak		
2	X	X	X	35	Belanja Modal Pengadaan Tanaman		

KODE REKENING					PEMBIAYAAN	ANGGARAN	KET
3	1				Penerimaan Pembiayaan		
3	1	1			Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		
3	1	1	01		Sisa Lebih Perhitungan Anggran (SILPA) Tahun Sebelumnya		
3	1	2			Pencairan Dana Cadangan		
3	1	2	01		Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3			Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan		
3	1	3	01		Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan		
3	1	3	01	01	Hasil Usaha Desa Lainnya		
3	2				Pengeluaran Pembiayaan		
3	2	1			Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	1	01		Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2			Penyertaan Modal Desa		
3	2	2	01		Penyertaan Modal Desa		

BUPATI BENGKULU SELATAN

ttd

H. DIRWAN MAHMUD

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
 NOMOR 06 TAHUN 2017
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
 NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG
 PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
 TAHAP TAHUN ANGGARAN
 PEMERINTAH DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Pagu Desa Rp.

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) Rp.	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp.	SALDO Rp.	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN					
1.2	Pendapatan Transfer					
1.2.1	Dana Desa					
	- TAHAP PERTAMA					
	- TAHAP KEDUA					
2.	BELANJA BANTUAN KE DESA					
2.1	Bidang Penyelenggaraan					
2.1.1	Pemerintahan					
2.1.2	Kegiatan					
2.1.3	Kegiatan					
	Dst					
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan					
2.2.1	Desa					
2.2.2	Perbaikan Saluran Irigasi					
	Penghapusan Jalan Desa					
	Dst					
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.3.1	Kegiatan					
2.3.2	Kegiatan					
2.3.3	Dst					
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2.4.1	Kegiatan.....					
2.4.2	Kegiatan					

Keterangan:
 SP2D
 Penyaluran
 Dana
 Desa
 dari
 Kabupaten
 ke
 Desa

Disetujui
 Oleh,

BENDAHARA DESA

KEPALA DESA

(.....)

(.....)

BUPATI BENGKULU SELATAN,

ttd

H. DIRWAN MAHMUD

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
 NOMOR 06 TAHUN 2017
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
 NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG
 PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
 TAHAP TAHUN ANGGARAN
 PEMERINTAH DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Pagu Desa Rp.

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) Rp.	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp.	SALDO Rp.	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN					
1.2	Pendapatan Transfer					
1.2.1	Dana Desa					
	- TAHAP PERTAMA					
	- TAHAP KEDUA					
	- TAHAP KETIGA					
2.	BELANJA BANTUAN KE DESA					
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
2.1.1	Pemerintahan					
2.1.2	Kegiatan					
2.1.3	Kegiatan					
	Dst					
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2.2.1	Desa					
2.2.2	Perbaikan Saluran Irigasi					
	Penghapusan Jalan Desa					
	Dst					
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.3.1	Kegiatan					
2.3.2	Kegiatan					
2.3.3	Dst					
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2.4.1	Kegiatan.....					
2.4.2	Kegiatan					

Keterangan:
 SP2D
 Penyaluran
 Dana
 Desa
 dari
 Kabupaten
 ke
 Desa

Disetujui
 Oleh,

BENDAHARA DESA

(.....)

KEPALA DESA

(.....)

BUPATI BENGKULU SELATAN,

ttd

H. DIRWAN MAHMUD